

**PENGEMBANGAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN
SECARA PARTISIPATIF BAGI RUMAH TANGGA PETANI
MISKIN DI KELURAHAN KURANJI
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

Oleh :

**FANNY SEPTYA
05114056**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**Pengembangan Indikator Ketahanan Pangan Secara Partisipatif Bagi
Rumah Tangga Petani Miskin di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji,
Kota Padang**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada bulan Desember 2009 sampai Januari 2010. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan indikator ketahanan pangan secara partisipatif dan mendeskripsikan tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani miskin menurut indikator ketahanan pangan partisipatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*) untuk tujuan pertama dan survey untuk tujuan kedua. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Untuk tujuan pertama, pengembangan indikator ketahanan pangan partisipatif diperoleh dari FGD (*Focuss Group Discussion*). Untuk tujuan kedua, hasil survey dianalisa dengan metode skoring.

Hasil penelitian ini berupa indikator ketahanan pangan secara partisipatif yakni : frekuensi makan 2 kali sehari, memiliki akses langsung dan tidak langsung terhadap pangan, memiliki minimal satu pekerja dalam rumah tangga, kepala keluarga dan pencari nafkah utama adalah suami, penghasilan perbulan tidak kurang dari Rp 600.000, memiliki proteksi sosial dan liquid asset, kesehatan keluarga 1 bulan terakhir baik, dan jumlah tanggungan keluarga tidak lebih dari 5 orang. Dari analisis hasil survey diperoleh kelompok rumah tangga menurut tingkat ketahanan pangan, yakni 56 persen rumah tangga tahan pangan, 44 persen rumah tangga tidak tahan pangan, dan 0 persen rumah tangga rawan pangan. Dari kelompok rumah tangga tidak tahan pangan, 36 persen belum mendapat raskin sehingga rumah tangga tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah.

Dari hasil penelitian disarankan perlu dilakukan uji validitas dan penyempurnaan analisis terhadap indikator ketahanan pangan partisipatif. Indikator ini dapat diaplikasikan dalam menentukan target penerima raskin guna melengkapi indikator kemiskinan dari BPS agar penerima raskin lebih tepat sasaran.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yowita (2005) mengemukakan bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan merupakan dua fenomena yang saling terkait, bahkan dapat dipandang memiliki hubungan sebab akibat. Kemiskinan akan menyebabkan akses terhadap pangan rendah sehingga status gizi dan kesehatan masyarakat rendah, akibatnya kualitas dan produktifitas SDM rendah. Masalah ini juga berimbas pada rendahnya investasi di sektor sosial dan ekonomi sehingga menurunkan tingkat perekonomian seseorang. Rendahnya pendapatan perkapita akan berakibat pada merosotnya pendapatan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah juga mengupayakan program pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat agar mempunyai daya beli yang cukup terhadap pangan. Menurut Kartasaputra (2003), terdapat korelasi antara pendapatan, dengan status gizi, status gizi berpengaruh terhadap produktifitas kerja. Jika status gizi seseorang rendah, maka produktifitas pun akan rendah, sehingga hasil dan pendapatan yang diperoleh akan rendah pula. Pada rumah tangga miskin, alokasi pendapatan untuk kebutuhan pangan masih kecil, dan berpengaruh pada produktifitas yang rendah, selanjutnya terangkum dalam lingkaran kemiskinan.

Menurut Arifin (2004) dalam Pambudy (2006), ketahanan pangan terwujud tidak hanya dilihat dari aspek ketersediaan pangan di masyarakat, tetapi juga aksestabilitas individu terhadap pangan sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan yang strategis tidak terlepas dari konsep usaha agribisnis. Ketersediaan pangan berhubungan erat dengan bagaimana membentuk iklim yang kondusif dan insentif bagi petani guna meningkatkan produksi dan produktifitasnya. Petani sebagai penyangga ketahanan pangan tidak hanya menghadapi masalah produksi pada subsistem on farm saja. Untuk meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan keuntungan petani, perlu didukung supply dan distribusi input-input pertanian (subsistem hulu), kegiatan pertanian itu sendiri (on farm activity), serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (subsistem hilir) yang terintegrasi

dalam sistem agribisnis. Sementara itu, aksestabilitas individu terhadap pangan yang berarti kemampuan individu termasuk petani sebagai penyangga ketahanan pangan untuk mengakses pangan yang tersedia, berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan. Konsep pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan pendapatan sangat diperlukan sehingga pendapatan rumah tangga mampu mengimbangi pangsa pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Pemberdayaan masyarakat jika dikaitkan dengan pertanian sebagai sektor kehidupan mayoritas penduduk Indonesia, dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat pada berbagai usaha di setiap subsistem agribisnis seperti industri pembenihan pada subsistem hulu, usaha perkebunan pada subsistem usaha tani, industri makanan pada subsistem pengolahan, promosi pada subsistem pemasaran, dan asuransi pada subsistem jasa dan penunjang.

Seperti yang ditegaskan dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Pada kenyataannya, ketersediaan pangan secara nasional maupun regional belum mampu menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga maupun individu. Hal yang sangat menentukan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah kemampuan mengakses pangan tersebut dan distribusi pangan. Permasalahan ini sering dialami oleh rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Pemerintah mencoba tanggap terhadap hal tersebut dengan program bantuan pangan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yang bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga miskin dari kerawanan pangan. Perumusan program bantuan pangan hendaknya dikaitkan dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga sasaran. Pengukuran ini sangat penting untuk menjadi pedoman bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dan tindakan mencegah rawan pangan. Pendataan rumah tangga yang diidentifikasi berhak mendapat bantuan pangan dikembangkan dengan indikator kemiskinan BPS melalui survey oleh BPS dalam waktu tiga tahun sehingga pendataan tersebut belum mampu mendeteksi dengan cepat dan tepat rumah tangga yang berhak mendapatkan raskin. Oleh karena itu, perlu dikembangkan indikator ketahanan pangan yang mendukung data BPS

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai indikator ketahanan pangan partisipatif dan mendeskripsikan ketahanan pangan rumah tangga petani miskin menurut indikator ketahanan pangan partisipatif di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kota Padang di peroleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator ketahanan pangan partisipatif atau yang dirumuskan bersama masyarakat adalah frekuensi makan, cara rumah tangga mendapat pangan (akses terhadap pangan), penghasilan perbulan, status pekerjaan, status kepala keluarga, proteksi sosial, liquid asset, kesehatan keluarga, dan jumlah tanggungan keluarga. Frekuensi makan yang menyatakan rumah tangga tersebut tahan pangan adalah 2 kali sehari. Akses terhadap pangan yang menyatakan tahan pangan dalam suatu rumah tangga jika rumah tangga mampu mencukupi kebutuhan beras baik dengan akses fisik maupun akses ekonomi. Penghasilan perbulan yang dikategorikan aman untuk kondisi tahan pangan adalah Rp 600.000. Status pekerjaan dalam keluarga juga menentukan ketahanan pangan, dimana untuk rumah tangga tahan pangan, sekurang-kurangnya memiliki satu orang pekerja. Sedangkan untuk status KK, rumah tangga yang tergolong tahan pangan tidak mempunyai kepala keluarga janda. Rumah tangga tahan pangan juga memiliki proteksi sosial dalam mendukung ketahanan pangan keluarganya. Liquid asset atau harta yang mudah dijual seperti hewan ternak yang mudah dijual seperti ayam juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Terakhir, jumlah tanggungan kepala keluarga rumah tangga tahan pangan tidak lebih dari 5 orang.
2. Indikator ketahanan pangan partisipatif dapat digunakan untuk melihat tingkat ketahanan pangan komunitas karena sesuai dengan kondisi lokal. Dari analisis seluruh indikator dalam rumah tangga dengan metode scoring diperoleh 56 persen rumah tangga tahan pangan, 44 persen rumah tangga tidak tahan pangan dan 0 persen rumah tangga rawan pangan. Sementara itu, dari rumah tangga yang tergolong tidak tahan pangan, 36 persen

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif . Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas. Padang
- Agusta, Ivanovich. 2009. Setelah Garis Kemiskinan Sayogjo. <http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-setelah-garis-kemiskinan-sajogyo.pdf> (30 April 2010)
- Anggita Yowita dan Rahmat Hendayana. 2005. *Anatomi Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Miskin dan Implikasinya terhadap Kebijakan Inovasi Pertanian*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor
- Asful, Ferdinal. 2007. *Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Partisipatif* . [Diktat]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang
- Avenzora, Ahmad dan Yoyo Karyono. 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan* . BPS. Jakarta
- Azis, Marwan. 2006. *Kriteria Kemiskinan Antara Instansi Bervariasi*. <http://www.kriteriakemiskinan.Com>
- Badan Ketahanan Pangan. 2006. *Arah Kebijakan Ketahanan Pangan*. <http://www.deptan.go.id> (26 November 2009)
- Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2006. *Kriteria Kemiskinan Menurut BKKBN*. <http://www.bkkbn.go.id> (26 November 2009)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar. 2007. *Peraturan Daerah Sumbar No.4 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010*. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2005-2006*. <http://www.bps.go.id> (1 Juli 2009)
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Padang Dalam Angka*. BPS. Padang
- Dewan Ketahanan Pangan. 2008. *Kebijakan Umum Dewan Ketahanan Pangan*. <http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/22/index.html> (25 Juli 2009)
- Hariyono, Tri. 2008. Dari Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan. <http://www.lumbungpangan.org> (15 April 2010)
- Helmi, Efrida. 2006. *Perbandingan Kriteria Kemiskinan Antara Pemerintah dan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang* [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.